

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan global merupakan upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh penduduk dunia. Namun, proses pembangunan yang berlangsung di berbagai negara masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti kemiskinan, kelaparan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, ketimpangan sosial dan ekonomi, pengangguran, serta permasalahan lingkungan. Permasalahan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan dapat memengaruhi keberlanjutan pembangunan. United Nations (2015) dalam publikasi yang berjudul “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*” mengatakan bahwa dunia perlu melakukan perubahan menuju pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan serta memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Sebagai bentuk komitmen bersama untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 mengadopsi *2030 Agenda for Sustainable Development* atau Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Agenda tersebut merupakan kerangka pembangunan global yang ditujukan untuk mengarahkan pembangunan hingga tahun 2030. Dalam agenda tersebut, United Nations (2015) menetapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terdiri atas 17 tujuan. SDGs dirancang sebagai agenda yang bersifat universal, terintegrasi, dan saling berkaitan untuk mendorong pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Ketujuh belas tujuan SDGs mencakup berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi masyarakat dunia, mulai dari pengentasan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, kesetaraan gender, penyediaan air bersih dan energi, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri dan infrastruktur, pengurangan kesenjangan, pembangunan kota dan permukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, perlindungan ekosistem laut dan daratan, hingga perdamaian, keadilan, kelembagaan yang kuat, dan kemitraan global (United Nations, 2015). Cakupan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan.

Penerapan SDGs menjadi penting karena pencapaian pembangunan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan seluruh kelompok masyarakat dan negara. United Nations (2015) menempatkan prinsip "*Leave No One Behind*" sebagai salah satu prinsip utama Agenda 2030. Prinsip tersebut menekankan bahwa pembangunan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang paling tertinggal dan rentan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari peningkatan capaian ekonomi secara agregat, tetapi juga dari kemampuan pembangunan dalam

memberikan kesempatan dan manfaat yang lebih merata kepada seluruh masyarakat.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia turut berkomitmen dalam melaksanakan SDGs sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Menurut Kementerian PPN/Bappenas (2024) dalam publikasi “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia”, Indonesia mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Pelaksanaan SDGs di Indonesia dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan pembangunan Indonesia. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa pencapaian SDGs tidak hanya menjadi tanggung jawab pada tingkat global, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan dan strategi pembangunan nasional Indonesia.

Dari 17 tujuan SDGs tersebut, salah satu tujuan yang berkaitan erat dengan prinsip pemerataan dan *Leave No One Behind* adalah Tujuan 10 (*Reduced Inequalities*) atau Mengurangi Kesenjangan. United Nations (2015) menyatakan bahwa Tujuan 10 diarahkan untuk “*reduce inequality within and among countries*”, yaitu mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara. Tujuan tersebut menjadi penting karena kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan adanya perbedaan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan, mengakses kesempatan ekonomi, serta menikmati hasil pembangunan.

Pengurangan ketimpangan dalam Tujuan 10 tidak hanya diarahkan pada penurunan kesenjangan secara umum, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat yang berada pada bagian terbawah distribusi ekonomi. United Nations (2015) melalui Target 10.1 menetapkan bahwa pada tahun 2030 perlu dicapai dan dipertahankan pertumbuhan pendapatan 40 persen penduduk terbawah (*bottom 40 percent*) pada tingkat yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional secara berkelanjutan.

Kelompok *bottom 40 percent* merujuk pada 40 persen penduduk yang berada pada bagian terbawah distribusi pendapatan atau konsumsi. Target tersebut menunjukkan bahwa pengurangan ketimpangan dilakukan dengan memastikan bahwa kelompok berpendapatan rendah memperoleh peningkatan pendapatan yang lebih cepat sehingga kesenjangan dengan kelompok berpendapatan lebih tinggi dapat dipersempit. Dalam konteks Indonesia, tujuan tersebut menjadi relevan karena ketimpangan ekonomi masih menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Kondisi ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui *Gini Ratio*, yaitu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk.

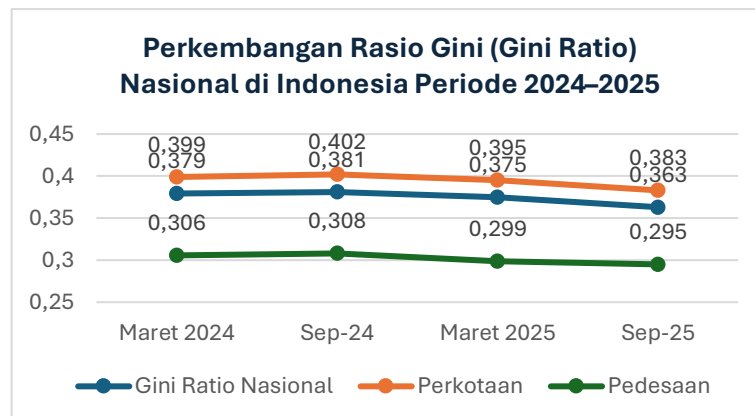
Badan Pusat Statistik (2025) menjelaskan bahwa nilai *Gini Ratio* berada antara 0 dan 1, dengan nilai yang semakin mendekati 0 menunjukkan distribusi yang semakin merata dan nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Oleh karena itu, perkembangan *Gini Ratio* Indonesia menjadi penting untuk melihat kondisi distribusi pendapatan sekaligus mengkaji faktor-faktor yang berkaitan dengan

perubahan ketimpangan pendapatan dalam rangka mendukung pencapaian SDGs Tujuan 10.

Kondisi ketimpangan pendapatan di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan tidak terlepas dari perubahan kondisi sosial ekonomi yang terjadi. Salah satu periode yang memberikan tekanan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah pandemi COVID-19 pada tahun 2020, pandemi COVID-19 memberikan tekanan terhadap berbagai aktivitas sosial ekonomi yang turut memengaruhi distribusi pendapatan masyarakat. Memasuki periode pemulihan ekonomi, dinamika ketimpangan pendapatan di Indonesia masih menjadi perhatian dan tercermin dari perubahan nilai *Gini Ratio* pada setiap periode pengukuran.

Berdasarkan laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), angka *Gini Ratio* nasional pasca-pandemi terus memperlihatkan tren penurunan yang konsisten, di mana angka kesenjangan sempat tercatat sebesar 0,381 pada September 2024, lalu bergerak turun menjadi 0,375 pada Maret 2025, hingga berhasil menyentuh level 0,363 pada September 2025. Pola pergerakan indikator agregat ketimpangan pengeluaran di Indonesia sepanjang periode transisi pemulihan ekonomi tersebut secara visual dapat dicerminkan melalui grafik berikut:

Gambar 1. 1 Perkembangan Rasio Gini (Gini Ratio) Nasional di Indonesia Periode 2024–2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (data diolah)

Gambar 1.1. menunjukkan penurunan angka *Gini Ratio* makro yang justru menyembunyikan masalah mendasar dalam struktur perekonomian Indonesia yang bertentangan dengan komitmen pembangunan inklusif SDGs. Masalah utama muncul karena indikator ketimpangan di Indonesia dihitung berdasarkan basis pengeluaran konsumsi masyarakat, bukan berdasarkan pendapatan riil. Fenomena ketimpangan pendapatan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Laporan Bloomberg Technoz (2026) dan data spasial BPS (2026) mengonfirmasi bahwa tingkat ketimpangan di daerah perkotaan masih bertahan tinggi di level 0,383, berbanding terbalik dengan daerah pedesaan yang hanya sebesar 0,295. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia masih menjadi salah satu persoalan dalam mewujudkan pemerataan hasil pembangunan. Dalam perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs), kondisi ini mengindikasikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok 40 persen masyarakat berpendapatan terbawah (*Bottom*

40% atau B40). Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai berbagai faktor yang diduga memengaruhi ketimpangan pendapatan untuk memahami dinamika distribusi pendapatan di Indonesia.

Ketimpangan pendapatan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi maupun sosial. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dapat dipengaruhi oleh investasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, inflasi, kualitas sumber daya manusia, urbanisasi, serta kebijakan pemerintah. Mengingat banyaknya faktor yang dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan, penelitian ini memfokuskan analisis pada investasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Ketiga variabel tersebut dipilih karena mewakili aspek penting dalam pembangunan ekonomi, yaitu pembentukan modal melalui investasi, peningkatan aktivitas ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi, serta kondisi pasar tenaga kerja melalui tingkat pengangguran terbuka. Ketiga aspek tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan distribusi pendapatan masyarakat sehingga relevan untuk dianalisis dalam menjelaskan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah investasi. Investasi memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan kapasitas produksi, serta menciptakan kesempatan kerja yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, manfaat investasi tidak selalu terdistribusi secara merata sehingga berpotensi memengaruhi distribusi pendapatan. Fenomena tersebut tercermin pada kondisi investasi di Indonesia, di mana laporan resmi Kementerian

Investasi/BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi yang mencapai Rp1.931,2 triliun masih didominasi oleh sektor industri logam dasar hasil hilirisasi. Konsentrasi investasi pada sektor padat modal (*capital intensive*) tersebut menyebabkan manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal dan tenaga kerja berkeahlian tinggi, sementara penyerapan tenaga kerja pada sektor padat karya relatif lebih terbatas. Kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan pendapatan antarkelompok masyarakat karena manfaat investasi belum sepenuhnya dirasakan secara merata.

Selain investasi, pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang diduga memengaruhi ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi umumnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan pendapatan. Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh pemerataan hasil pembangunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran 5 persen per tahun. Meskipun demikian, pertumbuhan tersebut masih didominasi oleh sektor-sektor tertentu, seperti industri pengolahan dan jasa, sedangkan sektor pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat berpendapatan rendah menunjukkan pertumbuhan yang relatif lebih rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap menjadi faktor yang perlu dikaji dalam hubungannya dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Selain investasi dan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka juga merupakan salah satu faktor yang diduga memengaruhi ketimpangan pendapatan karena berkaitan dengan kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Rendahnya tingkat keahlian, pendidikan, dan kapasitas produktif angkatan kerja dapat memengaruhi peluang masyarakat dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia tercatat sebesar 5,20 persen pada tahun 2024. Di sisi lain, pasar tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh pekerja pada sektor informal, yang umumnya memiliki tingkat produktivitas dan pendapatan relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal. Selain itu, fenomena *job-skill mismatch* atau ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja masih menjadi tantangan dalam penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pasar tenaga kerja yang diduga berkaitan dengan distribusi pendapatan masyarakat, sehingga tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu variabel yang relevan untuk dianalisis dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan masih menunjukkan hasil yang beragam sehingga terdapat *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut. Pada variabel investasi, Muryani, Esquivias, dkk. (2021) menemukan bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan Novia dan Utomo (2022) menunjukkan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan. Hasil yang berbeda juga ditunjukkan pada variabel pertumbuhan ekonomi, di mana

Salsabila dan Azhar (2023) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sementara Yoertiara & Feriyanto (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan. Demikian pula pada variabel tingkat pengangguran terbuka, Ariadi dan Muzdalifah (2020) menemukan adanya pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan Farrah dan Yuliadi (2024) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh laju investasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan masih belum menunjukkan hasil yang konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada analisis pengaruh laju investasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan menggunakan data time series Indonesia periode 2015–2025. Pemilihan periode tersebut dilakukan untuk menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan selama era implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dimulai pada tahun 2015. Selain itu, penelitian ini mengaitkan hasil analisis dengan Tujuan ke-10 SDGs (*Reduced Inequalities*), sehingga hasil penelitian tidak hanya memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ketiga variabel terhadap ketimpangan pendapatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai relevansinya

terhadap upaya mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan berbagai fenomena ketimpangan pendapatan di Indonesia, kondisi struktural yang masih menjadi tantangan dalam pemerataan hasil pembangunan, serta adanya *research gap* yang ditunjukkan oleh perbedaan hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh laju investasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh laju investasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan, serta menjadi masukan dalam mendukung upaya pencapaian Tujuan ke-10 *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu mengurangi ketimpangan. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengambil judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia dalam Perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah Investasi berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia pada periode 2015–2025?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia pada periode 2015–2025?
3. Apakah Pengangguran berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia pada periode 2015–2025?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diperoleh tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia pada periode 2015–2025
2. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia pada periode 2015–2025
3. Untuk menganalisis pengaruh Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia pada periode 2015–2025

1.4. Ruang Lingkup

Agar penelitian tidak melebar, maka dapat ditentukan bahwa ruang lingkup penelitian ini, adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini menganalisis negara Indonesia sebagai negara berkembang dengan karakteristik demografi dan potensi ekonomi yang besar di kawasan Asia Tenggara
2. Penelitian ini mencakup data *time series* selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2025 yang memungkinkan untuk menganalisis dinamika kesenjangan pendapatan serta instrumen makroekonomi di Indonesia.
3. Variabel yang digunakan pada penelitian ini meliputi Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependen adalah Ketimpangan Pendapatan yang diwakili oleh nilai Rasio Gini (*Gini Ratio*) nasional.

1.5. Manfaat Penelitian

Dari penjelasan di atas yang dimulai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan ruang lingkup, maka dapat diperoleh manfaat penelitian, sebagai berikut.

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan, khususnya instrumen makroekonomi seperti investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran di Indonesia dalam perspektif SDGs.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik di bidang ekonomi pembangunan, khususnya terkait determinan perkembangan distribusi pendapatan nasional dan evaluasi pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan.

3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan empiris dalam merumuskan kebijakan fiskal, iklim investasi, dan strategi ketenagakerjaan yang efektif untuk menekan angka Rasio Gini demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi, acuan, dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang ketimpangan pendapatan dalam perspektif SDGs pada variabel yang berbeda, serta cakupan wilayah, waktu, dan metode penelitian yang berbeda juga.